

## BAB V

### KESIMPULAN & SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa respons Qatar terhadap tekanan internasional menjelang Piala Dunia FIFA 2022 merupakan gabungan dari strategi reputasi dan reformasi parsial dalam sektor ketenagakerjaan. Meskipun sejumlah kebijakan progresif telah diadopsi—seperti penghapusan izin keluar, penerapan upah minimum non-diskriminatif, dan kerja sama dengan ILO—implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan struktural. Reformasi yang dilakukan cenderung bersifat *top-down*, terbatas pada sektor tertentu, dan tidak melibatkan pekerja migran sebagai aktor dalam proses perumusan kebijakan. Banyak keluhan masih muncul terkait upah yang belum dibayar, penyitaan paspor, serta minimnya kepercayaan terhadap mekanisme pengaduan resmi. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan besar antara kerangka hukum normatif dan praktik sosial yang dijalankan di lapangan. Dalam konteks ini, reformasi lebih banyak digunakan sebagai alat manajemen reputasi global daripada sebagai bentuk komitmen substansial terhadap perlindungan hak asasi manusia.

Lebih lanjut, respons Qatar tidak lepas dari tekanan simultan yang datang dari organisasi internasional seperti ILO, NGO HAM seperti Amnesty International dan Human Rights Watch, serta sponsor global dan media Barat. Jaringan advokasi transnasional memainkan peran penting melalui pola *boomerang pattern* dalam mengangkat isu pekerja migran ke tingkat global. Namun, keberhasilan reformasi lebih bersifat kosmetik dibandingkan transformasional. Hal ini terlihat dari fenomena *post-event syndrome* yang terjadi setelah Piala Dunia berakhir, di mana laporan pelanggaran terhadap pekerja kembali meningkat. Negara donor tenaga kerja seperti Indonesia dan Nepal pun belum membentuk sistem perlindungan yang cukup kuat untuk mengantisipasi penyalahgunaan di negara tujuan. Maka, reformasi yang dilakukan masih jauh dari cukup dalam menjamin keadilan sosial dan hak pekerja secara berkelanjutan.

Dengan mempertimbangkan seluruh pembahasan dalam skripsi ini, dapat disimpulkan bahwa pertanyaan rumusan masalah yang diajukan—yaitu "*Bagaimana bentuk dan sifat respons Qatar terhadap tekanan internasional dari organisasi internasional dan jaringan advokasi transnasional terkait pelanggaran hak pekerja migran menjelang Piala Dunia FIFA 2022?*"—telah terjawab secara komprehensif. Dari sisi bentuk respons, Qatar melakukan serangkaian reformasi ketenagakerjaan mulai dari penghapusan exit permit, pengesahan upah minimum non-diskriminatif, hingga kerja sama teknis dengan ILO. Sementara itu, dari sisi sifat respons, pembahasan menunjukkan bahwa kepatuhan Qatar bersifat dominan instrumental dan simbolik, bukan normatif, karena lebih digerakkan oleh kepentingan reputasional dan tekanan internasional daripada internalisasi nilai HAM. Hal ini selaras dengan kerangka *International Compliance Theory* (Franck, 1990) dan *Transnational Advocacy Networks* (Keck & Sikkink, 1998) yang digunakan dalam penelitian ini. Dengan demikian, rumusan masalah tidak hanya terjawab secara empirik melalui data dan studi kasus, tetapi juga terkonfirmasi secara konseptual melalui kerangka teoritik yang relevan.

## **5.2 Saran**

### **5.2.1 Saran Praktis**

Untuk memastikan keberlanjutan reformasi ketenagakerjaan di Qatar dan memperkuat perlindungan hak-hak pekerja migran, diperlukan langkah-langkah konkret di tingkat domestik dan internasional. Pemerintah Qatar harus memperkuat kapasitas institusional dalam bidang pengawasan ketenagakerjaan, termasuk meningkatkan jumlah dan kualitas petugas pengawas serta menjamin independensi lembaga penyelesaian sengketa. Selain itu, sistem pengaduan perlu dievaluasi secara menyeluruh agar lebih inklusif, dengan menyediakan akses bantuan hukum, penerjemah, dan saluran pelaporan multibahasa yang responsive. Partisipasi pekerja migran dalam penyusunan dan evaluasi kebijakan juga harus ditingkatkan melalui legalisasi serikat buruh independen atau pembentukan forum konsultatif yang representatif dan partisipatif.

Pada saat yang sama, organisasi internasional seperti ILO, FIFA, dan NGO HAM harus mempertahankan ketelibatan mereka dalam proses reformasi melalui kerja sama teknis, pelatihan kapasitas, dan pemantauan independen yang dilakukan secara berkala. Tekanan internasional tidak boleh berhenti setelah sorotan media pasca-event mereda, melainkan harus dikawal melalui sistem akuntabilitas berkelanjutan dan publikasi hasil evaluasi secara transparan. Sponsor global dan korporasi multinasional juga memiliki peran penting dengan mensyaratkan kepatuhan terhadap standar hak asasi manusia dalam kontrak bisnis mereka, guna menciptakan insentif positif terhadap perubahan kebijakan di tingkat nasional. Di sisi lain, negara-negara pengirim seperti Indonesia, Nepal, dan Bangladesh juga harus memperkuat tata kelola perekrutan tenaga kerja migran menjamin transparansi proses rekrutmen, dan mengembangkan perjanjian bilateral yang mencakup perlindungan hukum dan pengawasan Bersama di negara tujuan. Kolaborasi lintas aktor ini menjadi kunci untuk mencegah terjadinya regresi kebijakan dan memastikan bahwa transformasi ketenagakerjaan yang telah dirintis tidak terhenti pada tingkat simbolik, melainkan berakar kuat dalam sistem hukum dan sosial Qatar.

### **5.2.2 Saran Teoritis**

Secara teoritis, temuan dalam penelitian ini memperkuat relevansi *International Compliance Theory* dari Franck (1990) dalam menjelaskan respons negara otoriter terhadap tekanan internasional, terutama dalam konteks reputasi dan diplomasi global. Namun, untuk analisis yang lebih komprehensif, ke depan teori ini sebaiknya dipadukan dengan pendekatan *constructivist* atau *norm localization* seperti yang dikembangkan oleh Acharya, agar dapat menangkap dinamika internalisasi norma HAM dalam konteks negara-negara non-Barat. Di samping itu, model *Transnational Advocacy Networks* dari Keck & Sikkink terbukti relevan untuk menelusuri jalur-jalur tekanan non-negara dalam kebijakan domestik negara target. Akan tetapi, pengembangan model TAN ke arah *multi-level pressure mapping* dapat memperkaya analisis tentang interaksi simultan antara aktor negara, NGO, media, dan sektor swasta. Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi